Deliberatio : Jurnal Mahasiswa Komunikasi, Volume 6, No. 2, Oktober 2026, hlm. 327-339

Etnografi Komunikasi: Konstruksi Opini Publik Tradisi *Akkarungeng* Pilkades Soppeng

Andi Syadaruddin[1], Yusri[2], Wandi[3], Aldi[4]
[1]STISIP Petta Baringeng Soppeng, Indonesia
[2] STIE Pelita Buana, Makassar, Indonesia
[3] IAIN Bone, Indonesia
[4]STIT Al-Chaeriyah Mamuju, Indonesia

ABSTRAK
Pada era post-truth, banjir informasi dan rumor politik di media sosial dapat memperbesar krisis kepercayaan dan fragmentasi opini publik. Namun, kajian komunikasi politik masih terbatas dalam menjelaskan cara masyarakat pedesaan menyaring informasi melalui saluran kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi *Akkarungeng* sebagai Sistem Filter Informasi Berbasis Kultural dalam konstruksi opini publik pada Pilkades serentak masa transisi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi dilaksanakan selama lima bulan, April–Agustus 2026, di Desa Timusu, Mattabulu, dan Watu Tuo, Kabupaten Soppeng. Data diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap 15 informan dengan menerapkan informed consent dan penyamaran identitas. Data tutur dianalisis menggunakan delapan komponen SPEAKING Dell Hymes dan empat tahapan etnografi James Spradley. Hasil penelitian menunjukkan refungsionalisasi Akkarungeng menjadi arena meritokrasi karakter. Pappaseng Bugis menguatkan interpersonal trust dan mendorong cultural retreat dari polarisasi siber. Temuan ini menawarkan konsep cultural epistemic resistance sebagai model ketahanan pengetahuan lokal terhadap disinformasi, sekaligus mendorong pemanfaatan Tudang Sipulung dalam literasi politik masyarakat.

Kata-kata Kunci: Etnografi Komunikasi; Opini Publik; Pilkades; Akkarungeng; Pappaseng

Communication Ethnography: The Construction of Public Opinion in the Akkarungeng Tradition Soppeng Village Head Election

ABSTRACT
In the post-truth era, information overload (infodemic) and political rumors circulating on social media can intensify distrust and fragment public opinion. However, political communication scholarship remains limited in explaining how rural communities filter information through local wisdom-based communication channels. This study aims to examine the Akkarungeng tradition as a Cultural Information Filtering System in the construction of public opinion during transitional simultaneous village head elections (Pilkades). Using a qualitative approach with an ethnography of communication design, the study was conducted over five months, from April to August 2026, in Timusu, Mattabulu, and Watu Tuo Villages, Soppeng Regency. Data were collected through participant observation and in-depth interviews with 15 informants, with informed consent and identity protection procedures applied throughout the research process. Speech data were analyzed using Dell Hymes' eight SPEAKING components and James Spradley's four stages of ethnographic analysis. The findings indicate that Akkarungeng has been refunctionalized as an arena of character-based meritocracy. Bugis pappaseng reinforces interpersonal trust and encourages a form of cultural retreat from cyber polarization. The study proposes cultural epistemic resistance as a model of local knowledge resilience against disinformation and highlights the potential of Tudang Sipulung as a culturally grounded space for political literacy.

Keywords: *Communication Ethnography; Public Opinion; Village Head Elections; Akkarungeng; Pappaseng*

Korespondensi: Andi Syadaruddin, S.Sos. M.I.Kom. STISIP Petta Baringeng Soppeng. Kabupaten Soppeng Kode Pos. 90871. **No. HP, WhatsApp: 082191103089** *Email*: andisyadaruddin@gmail.com.

PENDAHULUAN

Era *post-truth* ditandai oleh melemahnya otoritas fakta dalam pembentukan opini publik dan meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap misinformasi, terutama pada momen-momen politik (Lewandowsky et al., 2017). Media sosial mempercepat kondisi ini. Informasi palsu bermuatan politik terbukti menyebar lebih jauh dan lebih cepat daripada informasi yang benar (Vosoughi et al., 2018), dan media sosial telah menjadi sumber informasi politik yang berpengaruh dalam kontestasi elektoral (Allcott & Gentzkow, 2017). Wardle and Derakhshan (2017) menyebut fenomena ini sebagai *information disorder*, yakni sirkulasi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang mengaburkan batas antara fakta dan rumor. Di Indonesia, penetrasi internet yang mencapai 79,5% pada 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII] (2024) membuat arus informasi politik digital tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau komunitas pedesaan.

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan arena kontestasi yang karakternya berbeda dari pemilihan tingkat nasional. Pilkades diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya. Kandidat dan pemilih umumnya saling mengenal melalui kekerabatan, ketetanggaan, dan interaksi sehari-hari, sehingga rumor tentang kandidat berdampak langsung pada reputasi sosial dan legitimasi calon. Pada masyarakat Bugis, penilaian terhadap kepemimpinan secara historis berkelindan dengan relasi kekerabatan, status sosial, dan nilai-nilai kehormatan (Pelras, 1997). Kerentanan informasi meningkat pada masa transisi kepemimpinan, seperti yang terjadi di Desa Timusu, Mattabulu, dan Watu Tuo, Kabupaten Soppeng. Ketiga desa dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) yang berfokus pada fungsi administratif, sehingga wacana tentang bakal calon, pencitraan, dan desas-desus berkembang sebelum tahapan kampanye resmi dimulai.

Literatur komunikasi politik digital umumnya menyoroti peran platform, algoritma, dan pola partisipasi daring dalam membentuk opini publik, termasuk pada pemilu di Indonesia (Nababan et al., 2024). Perspektif ini penting, tetapi cenderung memosisikan khalayak sebagai penerima yang rentan terhadap arus informasi digital. Sebaliknya, kajian klasik menunjukkan bahwa informasi tidak diterima secara langsung. Pengaruh media disaring melalui hubungan interpersonal dan *opinion leader* (Katz Lazarsfeld, 2019). Kajian kognitif juga menunjukkan bahwa manusia menjalankan kewaspadaan epistemik (*epistemic vigilance*) dengan menilai kredibilitas penutur dan koherensi isi pesan sebelum mempercayai informasi (Sperber et al., 2010). Namun, penjelasan tersebut belum banyak diuji pada komunitas pedesaan non-Barat yang memiliki institusi komunikasi adat. Dalam komunitas semacam itu, kewaspadaan epistemik dan pengaruh interpersonal dapat dijalankan melalui forum, norma tutur, dan simbol budaya yang khas.

Di Sulawesi Selatan, kekayaan institusi semacam itu terlihat pada tradisi Akkarungeng. Istilah ini berakar pada kata *arung* (penguasa) dan secara historis merujuk pada tatanan pemerintahan serta kebangsawanan tradisional Bugis beserta sistem nilainya (Mattulada, 1974; Pelras, 1997). Dalam kehidupan kontemporer, nilai-nilai tersebut hidup dalam forum dan ritus komunal, seperti *Tudang Sipulung*, *Mappadendang*, dan *Pattaungeng*, tempat warga bertukar pandangan dalam bingkai norma *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. Penelitian terdahulu telah menelaah internalisasi nilai Akkarungeng dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone (Firman et al., 2022) dan makna simbolik *pappaseng* melalui analisis semiotika (Dahlan et al., 2025). Keduanya berfokus pada nilai dan tanda, belum pada praktik tutur yang digunakan warga untuk memeriksa dan memvalidasi informasi politik digital di tengah masa transisi pemerintahan desa. Sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang menghubungkan etnografi komunikasi ruang tutur adat, *pappaseng*, dan validasi rumor politik digital pada Pilkades.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan etnografi komunikasi, yang memandang tuturan sebagai praktik yang terpola secara kultural dan dapat dianalisis melalui komponen *SPEAKING* (Hymes, 1974; Philipsen, 1992; Saville-Troike, 2008). Analisis tuturan dipadukan dengan teori konstruksi sosial atas realitas, yaitu dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 2011). Secara konseptual, penelitian ini mengajukan Akkarungeng sebagai *Cultural Information Filtering System*, yakni sistem penyaringan informasi yang bekerja melalui relasi sosial, norma budaya, pengalaman kolektif, dan kepercayaan interpersonal. Gagasan ini dihubungkan dengan resistensi epistemik (*epistemic resistance*) yang dikembangkan Medina (2013) dalam kajian ketidakadilan epistemik. Dalam penelitian ini, gagasan tersebut dikontekstualisasikan sebagai *cultural epistemic resistance*, yaitu kemampuan komunitas mempertahankan mekanisme pengetahuan dan penilaian berbasis budaya ketika berhadapan dengan arus informasi digital yang tidak terverifikasi. Kecenderungan warga untuk lebih mengandalkan lingkungan sosial terdekat dalam memeriksa informasi disebut *cultural retreat*. Posisi ini tidak memandang tradisi sebagai penolak modernitas, melainkan sebagai ruang tempat informasi digital diperiksa ulang melalui relasi sosial dan norma budaya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tradisi Akkarungeng berfungsi sebagai ruang komunikasi dalam konstruksi opini publik pada Pilkades masa transisi di Kabupaten Soppeng. Tujuan tersebut dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana Akkarungeng direfungsionalisasi sebagai arena penilaian kepemimpinan di Desa Timusu, Mattabulu, dan Watu Tuo; (2) bagaimana *pappaseng* (*Getteng*, *Lempu*, *Ada Tongeng*) dan norma *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* digunakan warga untuk memeriksa rumor politik digital dan menilai kandidat; dan (3) bagaimana komponen *SPEAKING* dan dialektika konstruksi sosial

menjelaskan pembentukan opini publik dalam peristiwa tutur tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada kajian etnografi komunikasi dan komunikasi politik melalui model ketahanan epistemik berbasis budaya. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar untuk memanfaatkan *Tudang Sipulung* sebagai medium literasi politik pada penyelenggaraan Pilkades.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi komunikasi untuk memahami bagaimana pola interaksi, aturan tutur, dan simbol-simbol budaya berperan dalam pembentukan opini publik di kalangan pemilih (Kriyantono, 2022). Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengamati praktik komunikasi politik sebagaimana berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis Soppeng. Dengan menempatkan masyarakat sebagai komunitas tutur (*speech community*), penelitian tidak hanya melihat isi pesan politik, tetapi juga konteks, relasi sosial, serta nilai budaya yang memengaruhi cara warga menyampaikan dan memaknai pesan tersebut (Puluhulawa et al., 2026).

Kegiatan penelitian lapangan (*fieldwork*) berlangsung selama lima bulan, dari April hingga Agustus 2026. Lokasi penelitian mencakup tiga desa di Kabupaten Soppeng, yakni Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo. Ketiganya dipilih secara *purposive* karena berada dalam masa transisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.), sehingga dinamika komunikasi dan pembentukan opini publik menjelang Pilkades menjadi lebih terlihat. Sebelum observasi dan wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan prosedur penelitian kepada informan serta memperoleh persetujuan mereka, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bagian dari pemenuhan prinsip etika penelitian.

Peneliti menjelaskan tujuan dan proses penelitian kepada setiap informan sebelum pengumpulan data dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan setiap informan memiliki hak untuk menghentikan keterlibatannya kapan saja tanpa konsekuensi. Mengingat penelitian berkaitan dengan dinamika sosial dan politik desa, identitas informan disamarkan melalui pemberian kode untuk menjaga privasi serta menghindari kemungkinan dampak terhadap posisi sosial mereka. Informan dipilih secara purposive berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu: (1) memiliki keterlibatan aktif dalam pelaksanaan atau kepemimpinan tradisi dan kegiatan budaya desa; (2) memiliki keterkaitan dengan otoritas sosial, keagamaan, atau adat; dan (3) terlibat langsung dalam percakapan maupun dinamika diskusi publik menjelang Pilkades.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi partisipan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi partisipan dilakukan dengan mengikuti secara langsung berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tutur, antara lain forum Tudang Sipulung, perayaan adat Mappadendang, dan ritus Pattaungeng. Selama proses observasi, peneliti memperhatikan pola interaksi, bentuk tindakan komunikatif, pilihan dan nada tutur, respons antarpeserta, serta suasana yang berkembang dalam setiap peristiwa komunikasi. Temuan lapangan tersebut kemudian dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai informasi politik yang beredar melalui internet, termasuk cara mereka memahami, menilai, dan merespons rumor politik serta proses penyampaian pappaseng dalam kehidupan komunitas.

Kerangka komponen tutur Dell Hymes dan tahapan etnografi James Spradley digunakan untuk mengintegrasikan analisis data tutur dan fenomena komunikasi. Pengoperasian SPEAKING (Dell Hymes): Data percakapan peristiwa kultural dibagi menjadi delapan komponen. *Setting/Scene* (fisik dan psikologis ruang Tudang Sipulung/Pattaungeng); *Participants* (penutur dan penutur tandingan); *Ends* (penyaring isu); *Act Sequence* (urutan penyampaian pappaseng); *Key* (nada percakapan etis); *Instrumentalities* (penggunaan bahasa dan dialek Bugis Soppeng); *Norms* (norma sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge; serta Genre (kategori tuturan petuah/metafisika tutur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Refungsionalisasi Tradisi Akkarungeng dalam Struktur Sosial-Politik Pedesaan Masa Transisi

Pemaparan hasil penelitian mengenai konstruksi opini publik di Kabupaten Soppeng diawali dengan menggambarkan kondisi sosial, demografis, dan geografis pada tiga lokasi penelitian, yaitu Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo. Ketiga desa tersebut memiliki karakter lingkungan yang berbeda. Timusu dan Watu Tuo berada di wilayah dataran rendah dengan aktivitas pertanian yang bertumpu pada lahan persawahan, sedangkan Mattabulu terletak di kawasan perbukitan dengan pola pertanian terasering dan sejumlah komoditas yang menonjol, seperti kopi arabika, cengkeh, dan susu kambing. Perbedaan kondisi geografis dan mata pencaharian tersebut tidak menghilangkan kesamaan latar budaya masyarakatnya. Ketiga desa memiliki basis kehidupan sosial masyarakat Bugis dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kesamaan tersebut menjadi konteks penting bagi keberlangsungan hubungan antara nilai keagamaan dan praktik adat dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya hadir dalam interaksi sosial masyarakat dan turut memberikan kerangka bagi warga ketika memahami berbagai persoalan bersama, termasuk

informasi serta isu politik yang berkembang menjelang Pilkades.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, komunikasi politik di ketiga desa berlangsung dalam konteks pemerintahan yang relatif serupa. Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo berada dalam masa transisi kepemimpinan setelah terjadi kekosongan jabatan kepala desa definitif. Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, tugas kepemimpinan sementara dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) yang berasal dari kalangan birokrat atau aparatur sipil negara. Posisi tersebut pada dasarnya berorientasi pada pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan, bukan pada pembangunan basis politik. Karena itu, keberadaan Plt. memiliki ruang gerak yang berbeda dengan kepala desa definitif, terutama dalam kaitannya dengan legitimasi politik dan keterlibatan dalam proses kontestasi Pilkades. Kondisi ini turut membentuk situasi komunikasi politik di tingkat desa, khususnya ketika warga mulai membicarakan calon, dukungan, dan arah kepemimpinan desa berikutnya.

Situasi transisi kepemimpinan tersebut membuka ruang bagi meningkatnya aktivitas politik di tingkat desa. Dinamika politik bahkan mulai terlihat sebelum tahapan kampanye resmi ditetapkan oleh panitia pemilihan. Warga telah berhadapan dengan berbagai pembicaraan mengenai bakal calon, pembentukan citra politik, desas-desus, serta informasi yang beredar melalui media sosial. Sebagian informasi berkembang melalui percakapan sehari-hari, sementara informasi lainnya datang dari ruang digital dan kemudian dibicarakan kembali di lingkungan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, warga membutuhkan rujukan yang dianggap dapat membantu mereka menilai informasi secara lebih hati-hati. Ruang komunikasi tradisional dan pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai lokal kemudian menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk memeriksa kembali informasi, mengurangi ketidakpastian, dan membentuk penilaian politik secara bersama.

Dalam situasi transisi politik tersebut, tradisi Akkarungeng tidak hanya bertahan sebagai bagian dari warisan adat, tetapi juga menunjukkan fungsi yang lebih kontekstual dalam kehidupan masyarakat di ketiga desa. Ruang ini menjadi tempat warga membicarakan berbagai persoalan, termasuk informasi dan wacana politik yang berkembang menjelang Pilkades. Secara historis, Akkarungeng berkaitan dengan sistem kekuasaan tradisional Bugis yang menempatkan garis keturunan dan kedudukan Arung sebagai bagian penting dari struktur sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan tersebut mengalami perubahan. Dalam percakapan masyarakat, penilaian terhadap calon kepala desa tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan status sosial atau asal-usul keluarga, tetapi semakin diarahkan pada karakter, integritas, rekam perilaku, dan kemampuan calon dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Pergeseran inilah yang dalam penelitian ini dipahami sebagai kecenderungan menuju *meritokrasi karakter*.

Hasil observasi partisipan menunjukkan bahwa praktik Akkarungeng di ketiga desa tidak hadir dalam bentuk yang sepenuhnya sama. Bentuk dan ruang interaksinya menyesuaikan dengan karakter sosial serta kebiasaan masyarakat di masing-masing wilayah. Di Desa Mattabulu, misalnya, praktik tersebut tampak dalam kegiatan tahunan Pattaungeng, yaitu perayaan syukur atas hasil bumi. Dalam suasana yang relatif informal, warga memiliki kesempatan untuk berbincang dan mengamati calon pemimpin secara lebih dekat. Penilaian terhadap calon tidak hanya didasarkan pada informasi politik yang disampaikan secara terbuka, tetapi juga pada sikap, perilaku, dan hubungan personal yang terlihat dalam interaksi sehari-hari.

Di Desa Watu Tuo dan Desa Timusu, praktik komunikasi tersebut terlihat melalui *Tudang Sipulung* dalam kegiatan pemerintahan serta perayaan adat *Mappadendang*. Kedua ruang tersebut mempertemukan warga dari berbagai kelompok dan generasi dalam suasana yang lebih cair. Percakapan mengenai kepemimpinan desa dapat berlangsung di sela-sela kegiatan tanpa harus mengikuti pola komunikasi kampanye yang formal. Dari interaksi tersebut terlihat bahwa ukuran kelayakan calon semakin dikaitkan dengan rekam jejak, perilaku, integritas, dan kejujuran, bukan semata-mata dengan latar belakang keluarga atau status keturunan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan cara masyarakat memaknai kepemimpinan dalam konteks politik desa.

Kanalisasi Pappaseng Bugis sebagai Struktur Penyaring Opini Publik Lokal dalam Menghadapi Rumor Politik Digital

Proses pembentukan opini publik dalam ruang komunikasi kultural di Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik yang bersifat pragmatis. Nilai-nilai yang terkandung dalam *pappaseng*, yaitu petuah yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat Bugis, turut menjadi rujukan ketika warga menilai informasi dan calon kepala desa. Peran tersebut semakin terlihat ketika informasi politik beredar dengan cepat melalui media sosial, termasuk rumor dan informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi seperti itu, pappaseng berfungsi sebagai acuan nilai yang membantu masyarakat mempertimbangkan apakah suatu informasi, perilaku, atau figur politik sesuai dengan norma yang mereka yakini.

Hasil pengamatan melalui pendekatan etnografi komunikasi menunjukkan bahwa tokoh adat dan pemuka agama di ketiga desa memiliki peran penting dalam menyampaikan kembali *pappaseng* pada berbagai peristiwa tutur, baik dalam forum yang bersifat formal maupun dalam percakapan sehari-hari. Petuah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai nasihat moral, tetapi juga menjadi rujukan ketika warga membicarakan kepemimpinan dan menilai calon kepala desa. Nilai *Getteng*, yang berkaitan dengan keteguhan sikap; *Lempu*, yang menekankan kejujuran dan amanah; serta *Ada Tongeng*, yang mengacu pada kebenaran dalam perkataan, menjadi bagian dari pertimbangan tersebut. Dalam praktiknya, nilai-

nilai ini membantu warga menilai klaim dan citra politik yang beredar melalui media digital dengan membandingkannya terhadap perilaku dan rekam jejak kandidat yang mereka ketahui secara langsung. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan opini publik di tingkat desa tidak sepenuhnya bergantung pada informasi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan penilaian yang berkembang dalam hubungan sosial masyarakat.

Kekuatan pappaseng sebagai rujukan dalam menilai informasi dan figur politik tampak melalui penggunaan metafora budaya yang telah dikenal dalam ingatan kolektif masyarakat Bugis Soppeng. Salah satu ungkapan yang ditemukan dalam percakapan pada *Tudang Sipulung* dan kegiatan Pattaungeng adalah, *"Aju maluru mi riala parewa bola"*, yang secara harfiah menggambarkan bahwa kayu yang luruslah yang layak digunakan sebagai bagian dari penopang rumah. Dalam percakapan mengenai calon kepala desa, ungkapan tersebut memperoleh makna yang lebih luas. "Kayu yang lurus" dipahami sebagai gambaran mengenai seseorang yang memiliki rekam jejak baik, berintegritas, dan memiliki niat yang tulus dalam menjalankan amanah. Metafora tersebut memperlihatkan bagaimana pengetahuan budaya digunakan warga untuk menilai kualitas calon dan menentukan figur yang dianggap mampu menjadi penopang kehidupan bersama di desa.

Lebih lanjut, penilaian terhadap calon juga dikaitkan dengan gagasan *Tawu Tongeng*, yakni sosok manusia yang dipandang memiliki kualitas diri dan perilaku yang baik. Pandangan tersebut berkaitan dengan prinsip *"Sininna Gau'e, Naonroi Asitinajang"*, yang menempatkan kepantasan, keadilan, dan kepatutan sebagai dasar dalam bertindak. Dalam percakapan masyarakat, nilai-nilai tersebut menjadi pertimbangan ketika warga menilai calon kepala desa. Perhatian tidak berhenti pada popularitas atau citra yang dibangun melalui media sosial, tetapi diarahkan pada perilaku, rekam jejak, dan cara calon menjalankan hubungan dengan masyarakat. Penggunaan simbol dan ungkapan budaya tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masih memiliki peran dalam membantu warga memahami dan menilai informasi politik di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Dekonstruksi Makna Kepemimpinan: Analisis Komponen Tutur SPEAKING dan Konstruksi Realitas Kultural

Pembentukan opini publik di Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo tidak hanya berlangsung melalui penerimaan pesan kampanye politik yang beredar di media modern. Proses tersebut juga berkembang melalui interaksi langsung dalam berbagai speech event yang berlangsung di lingkungan komunitas. Untuk memahami cara masyarakat menilai rumor dan informasi politik yang beredar di ruang digital, sekaligus melihat bagaimana kriteria kepemimpinan dibentuk selama masa transisi pemerintahan desa, data tutur lisan dianalisis menggunakan kerangka komponen SPEAKING yang dikembangkan Dell Hymes. Kerangka ini digunakan untuk membaca konteks, pelaku, tujuan, norma, serta bentuk komunikasi yang menyertai setiap peristiwa tutur. Salah satu tuturan tokoh adat

yang menggambarkan proses tersebut adalah sebagai berikut:

> *"Aju maluru-e mi riala parewa bola. Tanae ri Soppeng na-ampungi Tau Tongeng, tenniya tau iyya mallempang-lempang gau'na ri sosio siber. Deceng muisseng, acca tanra alaping, lempu tanra gau."*
> (Artinya: "Hanya kayu yang lurus yang dapat dijadikan komponen penopang rumah. Tanah Soppeng ini hanya diberkahi oleh Manusia yang Sebenar-benarnya, bukan orang yang bengkok perilakunya di media siber. Kebaikan itu ditandai oleh pemahaman, kecerdasan ditandai oleh kelakuan, dan kejujuran ditandai oleh perbuatan.")
> (Transkrip Wawancara/Observasi Tudang Sipulung, Desa Timusu dan Desa Watu Tuo, 22 Juni 2026 hingga 10 Juli 2026).

Tabel 2. Analisis Komponen Tutur SPEAKING Dell Hymes pada Peristiwa Kultural Akkarungeng

Komponen Tutur	Deskripsi Analitis Berbasis Data Lapangan
Setting / Scene	Terjadi di teras rumah adat saat forum Tudang Sipulung (malam hari, suasana informal-hikmat yang intim).
Participants	Penutur: Pemuka Adat/*Opinion Leader* (INF-01). Mitra Tutur: Pemilih lokal, pemuda, dan tokoh masyarakat desa.
Ends	Meretrospeksi kriteria calon pemimpin desa dan menetralkan disinformasi politik dari grup WhatsApp/Facebook.
Act Sequence	Diawali pembukaan santai ⇒ pengutipan metafora pappaseng ⇒ dialog interaktif dan penegasan moralitas.
Key	*Serious-instructive* (serius namun persuasif-kebapakan), memancarkan otoritas moral tradisional.
Instrumentalities	Bahasa Bugis Soppeng ragam tinggi yang dikombinasikan dengan istilah kontemporer ("*sosio siber*").
Norms	Berlandaskan etika sipakatau, sipakalebbi, sipakainge (dilarang menyerang pribadi calon secara vulgar).
Genre	Pappaseng (tuturan petuah moral) yang dikemas dalam bentuk nasihat musyawarah politik pedesaan.

Sumber: Hasil olah data penulis, 2026.

PEMBAHASAN

Secara teoretis, hasil analisis terhadap komponen tutur tersebut memperlihatkan bagaimana proses Konstruksi Sosial atas Realitas yang dikemukakan Berger dan Luckmann berlangsung melalui hubungan yang bersifat dialektis. Realitas sosial dalam konteks penelitian ini dapat dipahami melalui tiga momen utama, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966; Ningtiyas, 2026):

Eksternalisasi. Pada tahap ini, nilai-nilai etis yang terkandung dalam pappaseng diungkapkan kembali oleh pemuka adat dalam percakapan komunal sebagai tanggapan terhadap berbagai informasi dan rumor politik yang beredar di ruang digital. Ungkapan "Aju maluru-e mi riala parewa bola" digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan sosok pemimpin yang dianggap layak dipercaya. Makna "kayu yang lurus" kemudian dikaitkan dengan nilai Lempu (kejujuran) dan Getteng (keteguhan atau konsistensi) sebagai dasar dalam menilai karakter calon kepala desa.

Objektivasi. Pada tahap ini, makna yang terkandung dalam metafora tersebut tidak lagi berhenti sebagai ungkapan individual, tetapi berkembang menjadi rujukan bersama dalam menilai calon kepala desa. Citra yang dibangun kandidat melalui media sosial kemudian dibandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman warga terhadap perilaku mereka dalam

kehidupan sehari-hari. Konsep *Tawu Tongeng*, yang menekankan kualitas diri dan integritas nyata, menjadi salah satu ukuran yang digunakan masyarakat dalam melakukan penilaian. Dalam proses tersebut, informasi dari media digital tidak diterima begitu saja. Kredibilitasnya dibicarakan dan diperiksa kembali melalui interaksi warga, termasuk dalam forum *Tudang Sipulung*, sehingga penilaian terhadap kandidat terbentuk melalui proses validasi yang berlangsung secara kolektif.

Internalisasi. Pada tahap ini, nilai dan norma yang muncul dalam interaksi komunal mulai menjadi bagian dari cara pandang pemilih dalam menilai persoalan politik. Warga tidak hanya memahami pesan yang disampaikan oleh tokoh adat, tetapi juga menjadikannya sebagai pertimbangan ketika menentukan sikap terhadap calon kepala desa. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut dapat mendorong kecenderungan cultural retreat, yaitu ketika warga lebih mengandalkan hubungan interpersonal dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sosial terdekat daripada menerima informasi politik digital secara langsung. Kepercayaan terhadap tokoh adat dan pengalaman interaksi dengan komunitas menjadi salah satu dasar dalam membentuk penilaian politik, terutama ketika informasi di media digital dianggap tidak cukup meyakinkan.

Penggabungan kerangka SPEAKING dengan perspektif dialektika konstruksi sosial menunjukkan bahwa tradisi Akkarungeng memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjadi tempat berkumpulnya warga. Di dalamnya berlangsung proses pertukaran informasi, penilaian, dan pemaknaan terhadap berbagai persoalan politik yang berkembang di masyarakat. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa warga pedesaan tidak selalu menerima informasi digital secara pasif. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sosial, penggunaan ungkapan budaya, serta nilai-nilai etis lokal menjadi bagian dari pertimbangan mereka ketika memeriksa dan menilai informasi politik yang beredar.

SIMPULAN

Penelitian etnografi komunikasi mengenai proses pembentukan opini publik menjelang Pilkades serentak di Desa Timusu, Desa Mattabulu, dan Desa Watu Tuo, Kabupaten Soppeng, mengidentifikasi tiga temuan utama yang menggambarkan peran komunikasi kultural dalam membentuk cara masyarakat memahami dan menilai informasi politik:

Refungsionalisasi Kultural pada Masa Transisi: Dalam situasi transisi kepemimpinan akibat belum adanya pejabat kepala desa definitif, tradisi Akkarungeng menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat memaknai dan memanfaatkannya. Ruang yang secara historis berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan tradisional tidak lagi dipahami semata-mata dalam kerangka status atau garis keturunan. Dalam percakapan menjelang Pilkades, perhatian warga justru lebih banyak diarahkan pada kualitas pribadi calon, seperti integritas, rekam jejak, tanggung jawab, dan kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat. Pergeseran pemaknaan tersebut menunjukkan kecenderungan munculnya

"meritokrasi karakter", yakni penilaian terhadap calon berdasarkan kualitas dan perilakunya, bukan semata-mata latar belakang keluarganya.

Kanalisasi Pappaseng sebagai Sistem Penyaringan: Di tengah derasnya peredaran rumor politik dan informasi yang belum terverifikasi di ruang digital, pappaseng Bugis menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat dalam menilai calon kepala desa. Nilai *Getteng, Lempu, dan Ada Tongeng* digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melihat keteguhan sikap, kejujuran, serta kesesuaian antara perkataan dan perilaku kandidat. Dengan cara tersebut, pappaseng tidak hanya berfungsi sebagai warisan nilai, tetapi juga hadir dalam proses warga memeriksa informasi dan menilai integritas calon di tengah perubahan lingkungan komunikasi politik.

Menguatnya Interpersonal Trust dalam Pembentukan Opini: Pada tingkat masyarakat desa, ditemukan kecenderungan warga untuk kembali mengandalkan hubungan sosial yang telah mereka kenal ketika menghadapi informasi politik yang beragam di ruang digital. Kecenderungan ini dapat dipahami sebagai cultural retreat, yaitu ketika warga lebih memilih memeriksa dan mendiskusikan informasi melalui lingkungan sosial terdekat daripada mengikuti arus percakapan yang berkembang di media digital. Kepercayaan terhadap tokoh adat dan opinion leader yang terbentuk melalui interaksi langsung menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai informasi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal masih memiliki posisi yang kuat dalam pembentukan opini publik di tingkat desa, meskipun masyarakat telah berhadapan dengan komunikasi politik berbasis teknologi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan mendasar: (1) Cakupan Geografis dan Sosiologis: Riset ini berfokus pada komunitas pedesaan etnis Bugis di Kabupaten Soppeng yang relatif homogen dengan ikatan komunitarian dan institusi adat yang masih sangat kuat; (2) Pendekatan Kualitatif: Penggunaan pendekatan kualitatif-etnografi membatasi generalisasi statistik atas temuan ini pada populasi wilayah lain yang memiliki dinamika sosiopolitik berbeda; dan (3) Variabel Rentang Usia: Penelitian ini belum membedakan secara terukur tingkat resistensi informasi antara kelompok pemilih pemula (Gen Z) yang *highly-digitalized* dengan kelompok pemilih senior.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, diajukan beberapa arah penelitian mendatang: (1) Studi Komparatif Lintas Etnis/Wilayah: Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di kawasan urban atau daerah peri-urban di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat heterogenitas penduduk dan penetrasi digital yang lebih tinggi; (2) Pendekatan Netnografi dan Mixed-Methods: Disarankan mengombinasikan etnografi lapangan dengan pendekatan netnografi (etnografi siber) atau analisis jaringan media sosial (Social Network Analysis) untuk memetakan secara kuantitatif sejauh mana arus rumor siber berpenetrasi ke dalam percakapan warga sebelum difilter oleh tokoh adat; dan (3) Fokus Segmentasi Demografi: Riset mendatang dapat mengkaji

secara khusus perilaku kognitif-politik pemilih muda di pedesaan dalam menegosiasikan antara pengaruh influencer media sosial dengan petuah moral para opinion leader tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, *31*(2), 211–236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211

APJII, A. P. J. I. I. (2024). Survei penetrasi internet Indonesia 2024. In *APJII*. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media. https://books.google.co.id/books?id=Jcma84waN3AC

Dahlan, M., Suhartika, E., Faradiba, N. I., Zariat, S. A., & Mansyur, N. I. (2025). Analisis Semiotika Pappaseng Taoriolo Pada Masyarakat Suku Bugis-Makassar. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(02 SE-Artikel), 797–802. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/652

Firman, S., Tamma, S., & Qomariah, P. (2022). Pengaruh Nilai Budaya dalam Politik Lokal di Kabupaten Bone. *Politics and Humanism*, *1*, 29–38. https://doi.org/10.31947/jph.v1i1.21183

Hymes, D. (1974). *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. University of Pennsylvania Press, Incorporated. https://books.google.co.id/books?id=B3NIAeabrHwC

Katz/Lazarsfeld. (2019). *Personal Influence* (pp. 293–296). https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_67

Kriyantono, P. R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=yrkFEQAAQBAJ

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, *6*(4), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008

Mattulada. (1974). *Latoa: satu lukisan analitis terhadap antropologi-politik orang Bugis*. Universitas Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=K5OfkffYDPoC

Medina, J. (2013). *The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and the Social Imagination*. OUP USA. https://books.google.co.id/books?id=j_nUeoyASq8C

Nababan, A., Namotemo, D., & Ferdinandus, D. (2024). Peran Media Sosial Tiktok dalam Membentuk Opini Publik Tentang Calon Presiden pada Pemilu 2024. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*, 31–41. https://doi.org/10.56799/jim.v3i6.3374

Pelras, C. (1997). *The Bugis*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=X-4CEAAAQBAJ

Philipsen, G. (1992). *Speaking Culturally: Explorations in Social Communication*. State University of New York Press. https://books.google.co.id/books?id=O9gRL0LH_dgC

Puluhulawa, F., Kurniasih, S., Utami, A., Widowati, I. G. A. R., Rani, A., & Rosytha, A. (2026). *MEDIA, BUDAYA DAN KOMUNIKASI*.

Saville-Troike, M. (2008). *The Ethnography of Communication: An Introduction*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=dXd6zOtliZsC

SPERBER, D. A. N., CLÉMENT, F., HEINTZ, C., MASCARO, O., MERCIER, H., ORIGGI, G., & WILSON, D. (2010). Epistemic Vigilance. *Mind & Language*, *25*(4), 359–393. https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x

Spradley, J. P., & Elizabeth, M. Z. (1997). *Metode etnografi*. Tiara Wacana Yogya. https://books.google.co.id/books?id=ehLGnQAACAAJ

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, *359*(6380), 1146–1151.

https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *INFORMATION DISORDER : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*.